

LAPAN Siap Melangkah Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Oleh: Chusnul Tri Judianto

Salah satu metode untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan dibentuknya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SBPE). Suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada instansi pemerintahan. Sementara SPBE yang diimplementasikan pada Instansi Pemerintahan harus merupakan SPBE yang mendukung program nasional, program Instansi Pemerintah dan diselenggarakan oleh Instansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan SPBE dikenal tipe hubungan kerja yang merupakan bagian dari proses bisnis yang harus diperhatikan untuk menjamin tepatnya sasaran kinerja yang dilakukan. Tipe hubungan kerja tersebut adalah:

1) ***Government to Citizen (G2C)***

merupakan teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan transparansi informasi, informasi akuntabilitas kinerja dan rencana kerja sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi penting tersebut.

2) ***Government to Business (G2B)***

adalah jenis hubungan pemerintahan dengan bisnis yang terjadi karena kebutuhan relasi antara pemerintah dengan kalangan pelaku bisnis atau sebaliknya dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis terkait regulasi bisnis yang diterapkan pemerintah, permodalan atau kerjasama padat modal juga padat karya.

3) ***Government to Government (G2G)***

merupakan sebuah interaksi yang diperuntukkan untuk pertukaran informasi diantara pemerintahan yang berbeda dalam bentuk media elektronik (website, portal) untuk memudahkan memenuhi kebutuhan dalam pencarian informasi antar pemerintahan. Kebutuhan informasi ini berkaitan dengan membangun kerjasama baik ekonomi, militer, politik, sosial, teknologi, lingkungan, sumber daya manusia juga kerja sama hukum.

4) ***Government to Employees (G2E)***

Merupakan hubungan yang dibutuhkan oleh pegawai pemerintahan atau aparatur sipil Negara yang interaksinya dibangun berbasis elektronik agar proses bisnis yang dilakukan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawai.

Dalam proses pelaksanaan SPBE pada institusi pemerintahan difokuskan pada tiga domain utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya yaitu; domain tatakelola, layanan dan kebijakan SPBE. Masing-masing domain ini memiliki area spesifik penyelenggaraan SPBE dan informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE. Dalam pelaksanaan SPBE tidak terlepas dari proses keterpaduan dari seluruh sistem yang digunakan bersama oleh institusi pemerintah. Sehingga keberhasilan pelaksanaan SPBE juga tidak terlepas dari adanya kepemimpinan pusat atau *National Government Chief Information Officer* (NG-CIO) yang akan menyatukan asset TIK nasional berkaitan dengan sinergitas sistem elektronik, regulasi-regulasi yang akan ditetapkan juga percepatan pengambilan kebijakan secara terpusat untuk mengantisipasi perkembangan TIK yang sangat cepat.

Sebagai langkah awal pelaksanaan SPBE di LAPAN, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi LAPAN sudah melakukan sosialisasi SPBE kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di Lingkungan LAPAN pada acara Raker Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi berbasis *E-Government* yang juga dihadiri oleh para Deputi Teknis dan Sekretaris Utama dan dibuka langsung oleh Kepala LAPAN pada tanggal 18-20 Desember 2017.



Sosialisasi Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi Berbasis *E-Government*

Selanjutnya dalam penerapan SPBE ini juga akan dilakukan proses evaluasi hasil kinerja yang dilakukan pada setiap instansi pemerintah. Evaluasi penyelenggaraan SPBE Instansi Pemerintah ini merupakan suatu proses penilaian terhadap penyelenggaraan SPBE di Instansi Pemerintah yang akan menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan dari penyelenggaraan SPBE di Instansi Pemerintah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif maka proses evaluasi ini dilakukan dengan metoda; evaluasi mandiri, *desk evaluation*, wawancara dan verifikasi lapangan. Parameter dasar keberhasilan SPBE adalah adanya *Enterprise Architecture* (EA) yang mencakup keseluruhan prinsip, metode dan model perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur *enterprise*. EA dibuat untuk menjadi dasar pelaksanaan seluruh proses bisnis TIK, mengetahui kebutuhan bisnis dan informasi organisasi, mendukung migrasi pembaharuan sistem, kemudahan migrasi pada kondisi masa depan dan mendukung sasaran bisnis. *Enterprise Architecture* (EA) dimaksudkan untuk memperbaiki manajemen dan berfungsinya sistem informasi pada suatu organisasi. EA ini akan memodelkan *enterprise* sehingga memungkinkan penerapan teknologi informasi secara efektif dan efisien.

DOMAIN-1 TATA KELOLA SPBE		DOMAIN 3 KEBIJAKAN	
Aspek-1	Kelembagaan	Aspek 6	Kebijakan Tatakelola SPBE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 1 ▪ Indikator 2 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah ▪ Inovasi Proses Bisnis terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 18 ▪ Indikator 19 ▪ Indikator 20 ▪ Indikator 21 ▪ Indikator 22 ▪ Indikator 23 ▪ Indikator 24 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Tim pengarah SPBE Instansi Pemerintah ▪ Kebijakan inovasi proses bisnis Terintegrasi. ▪ Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah ▪ Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK ▪ Kebijakan Pengoperasian Pusat Data ▪ Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi ▪ Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek-2	Strategi dan Perencanaan		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 3 ▪ Indikator 4 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah ▪ Anggaran dan Belanja TIK 		
Aspek-3	Teknologi Informasi dan Komunikasi		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 5 ▪ Indikator 6 ▪ Indikator 7 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengoperasian Pusat Data ▪ Integrasi Sistem Aplikasi ▪ Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai 		
DOMAIN-2 LAYANAN SPBE		Aspek 7 Kebijakan Layanan SPBE	
Aspek-4	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 25 ▪ Indikator 26 ▪ Indikator 27 ▪ Indikator 28 ▪ Indikator 29 ▪ Indikator 30 ▪ Indikator 31 ▪ Indikator 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Layanan Disposisi dan Korespondensi ▪ Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian ▪ Kebijakan Layanan Manajemen Penganggaran ▪ Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan ▪ Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja ▪ Kebijakan Layanan Pengadaan ▪ Kebijakan Layanan Pengaduan Publik ▪ Kebijakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 8 ▪ Indikator 9 ▪ Indikator 10 ▪ Indikator 11 ▪ Indikator 12 ▪ Indikator 13 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Disposisi dan Korespondensi ▪ Layanan Manajemen Kepegawaian ▪ Layanan Manajemen Penganggaran ▪ Layanan Manajemen Keuangan ▪ Layanan Manajemen Kinerja ▪ Layanan Pengadaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 33 ▪ Indikator 34 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Layanan Whistle Blowing System ▪ Kebijakan Layanan Publik Instansi Pemerintah
Aspek-5	Layanan Publik Berbasis Elektronik		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 14 ▪ Indikator 15 ▪ Indikator 16 ▪ Indikator 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Pengaduan Publik ▪ Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum ▪ Layanan Whistle Blowing System ▪ Layanan Publik Instansi Pemerintah 		

Domain, Aspek dan Indikator SPBE

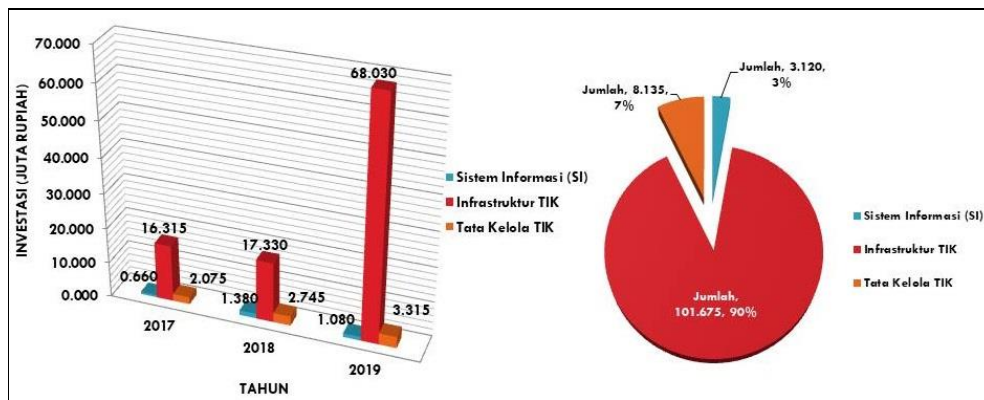
Disamping implementasi EA maka keberhasilan SPBE juga ditentukan oleh implementasi SOP yang dilakukan pada setiap instansi pemerintah sesuai proses bisnis berdasar tugas dan fungsi. Sebagai gambaran pelaksanaan SPBE disetiap instansi pemerintah yaitu dengan menerapkan beberapa aspek sesuai domain SPBE. Penilaian SPBE menggunakan metode tingkat kematangan dalam menilai 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek, dan 34 (tiga puluh empat) indikator

Country	Rank 2016	EGDI 2016
Georgia (Country)	61	0.6108
Philippines	71	0.5766
Sri Lanka	79	0.5445
Uzbekistan	80	0.5434
Mongolia	84	0.5194
Armenia	87	0.5179
Viet Nam	89	0.5143
India	107	0.4638
Indonesia	116	0.4478
Bhutan	133	0.3507
Syrian Arab Republic	137	0.3404
Lao People's Democratic Republic	148	0.3090
Pakistan	159	0.2583
Timor-Leste	160	0.2582
Myanmar	169	0.2362
Yemen	174	0.2248

E-Government Development Index 2016 Wilayah Asia
(sumber: UN e-government Knowledge Data Base)

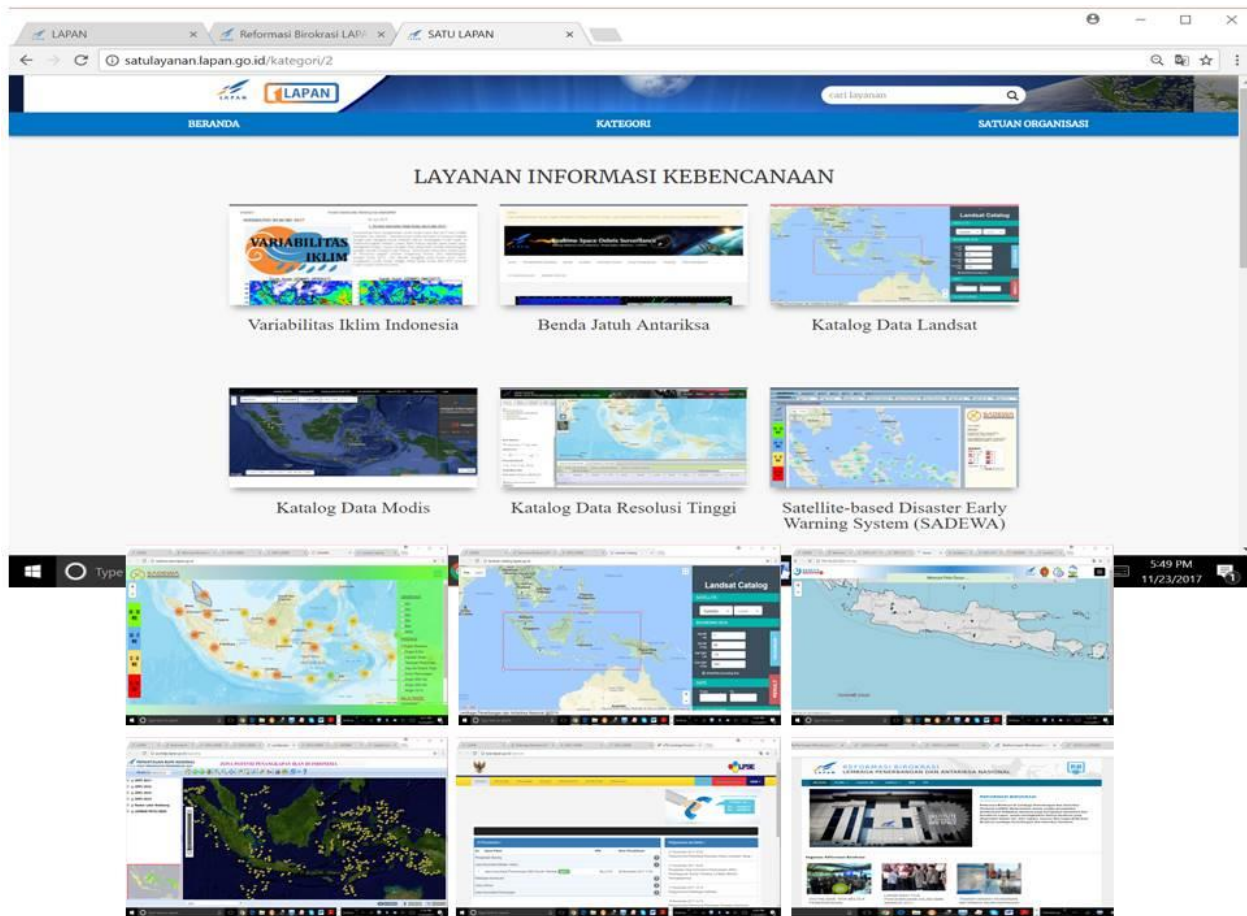
Bila melihat peringkat indeks pengembangan SPBE (*E-Government Development Index*), pada tahun 2016 Indonesia berada pada peringkat ke 116 EGDI, turun sejauh 10 peringkat bila dibandingkan tahun 2014 yang berada pada peringkat 106. Peringkat ini masih jauh berada di bawah beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia (60), Filipina (71), dan Brunei Darussalam (83). Sementara pada posisi

pertama hingga kelima, diduduki oleh negara Inggris, Australia, Republik Korea Selatan, Singapura, dan Finlandia. Sementara itu untuk peringkat *Online Service Index* (OSI) dan *Telecommunication Infrastructure Index* (TII) Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata wilayah Asia Tenggara. Hal ini menandakan perlu keseriusan dalam mengolah sistem administrasinya agar lebih efektif dan efisien juga akuntabel dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebelumnya untuk melihat penerapan SPBE pada instansi pemerintah, dibuat pemeringkatan terkait e-government ini yang disebut pemeringkatan *e-government* Indonesia (PEGI) yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo. Sejak 2016 PEGI tidak dilaksanakan lagi dan selanjutnya akan diganti dengan pemeringkatan SPBE oleh KemenPAN-RB yang saat ini terus disosialisasikan dan segera akan ditetapkan peraturannya. Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE di Instansi Pemerintah.



Perencanaan Investasi TIK LAPAN hingga tahun 2019

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai salah satu institusi pemerintah dalam melayani masyarakat juga telah melakukan langkah-langkah taktis untuk memenuhi kriteria SPBE ini antara lain dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk layanan publik berbasis elektronik, mengimplementasikan sistem TIK yang dikendalikan oleh unit kerja setingkat Direktorat (Eselon-2), memiliki Komite Teknologi Informasi (KTI), *Chief Information Officer* (CIO) dengan fasilitas *data centre*, jaringan internet terintegrasi, kendali jaringan mandiri, sistem keamanan informasi, *security Operation Centre* (SOC), *Data Recovery Centre* (DRC) untuk beberapa aplikasi utama dan telah memiliki rencana 5 tahunan terkait investasi TIK, pengembangan infrastruktur TIK, Tata kelola TIK dan Sistem Informasi yang tertuang dalam *Information Technology Master Plan 2014-2018* (ITMP) yang telah ditetapkan dengan Perka LAPAN No.11 tahun 2014 tentang Rencana Strategis Teknologi informasi dan Komunikasi LAPAN 2014-2018 yang saat ini sedang dilakukan evaluasi kembali validitasnya untuk pelaksanaan hingga 2019. Beberapa penyempurnaan sistem software aplikasi, hardware keamanan informasi dan data base masih terus dilakukan agar supaya layanan pemerintahan berbasis elektronik dapat dijalankan dan digunakan oleh masyarakat umum, akademisi dan instansi pemerintah terkait dengan baik.



Layanan Publik Penerbangan dan Antariksa Berbasis Elektronik

Date: 29/Jan 2018